

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan tentang konsep pemisahan fungsi antara manajemen sebagai *agent* dan pemegang saham perusahaan sebagai *principle*. *Principle* merupakan pihak yang memberi kewenangan kepada *agent* untuk bertindak atas nama *principle*, sedangkan manajer merupakan *agent* yang bertindak untuk kepentingan pemegang saham yaitu untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Teori agensi muncul karena adanya sebuah perjanjian hubungan kerja antara *principle* yang memiliki wewenang dengan *agent* atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Manajer (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principle*) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya.

Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan (Dinar, 2020). Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontekstual antara *principle* dan *agent*, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kelompok ataupun organisasi. *Agency theory* adalah teori mengenai struktur kepemilikan perusahaan yang dikelola oleh manajer bukan pemilik, berdasarkan kenyataan bahwa manajer profesional bukan *agent* yang sempurna dari pemilik perusahaan. Dengan demikian belum tentu selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Dengan kata lain, manajer sebagai manusia rasional dalam pengambilan keputusan perusahaan akan memaksimalkan kepuasan dirinya sendiri. Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (*principle*) menyewa pihak lain untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada *agent* tersebut. Di dalam perusahaan, CEO merupakan *agent* dan pemegang saham merupakan *principle*. Salah satu elemen dari teori agensi adalah bahwa *principle* dan *agent* memiliki preferensi atau tujuan berbeda (Darma, 2021).

Teori agensi didirikan untuk memahami dan memecahkan masalah ketika informasi tidak lengkap pada saat penandatanganan kontrak. Kontrak yang dimaksud disini adalah kontrak antara *principle* (pemberi kerja, seperti pemegang saham) dan *agent* (pengelolaan). Jika *agent* memiliki keuntungan, teori keagenan akan muncul ada perbedaan antara informasi dan subjek untuk kepentingan kedua belah pihak, maka akan terjadi *principle agent problem* dimana *agent* akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan *principle*.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan masing-masing. *Agent* diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlihat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang lebih, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang fleksibel. Sedangkan *principle*, diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Hubungan agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan ini seharusnya menghasilkan hubungan simbiosis mutualisme yang dapat menguntungkan semua pihak, khususnya jika setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab. Namun yang terjadi justru sebaliknya, munculnya permasalahan agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan.

Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principle*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa, *principle* mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada *agent*

tersebut. Pihak *principle* (investor) berperan sebagai penyedia sumber daya dan dana yang digunakan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen bertanggungjawab penuh dalam kegiatan pengolahan sumber daya dan dana tersebut agar dapat memenuhi kepentingan pihak *principle*. Pihak *principle* melakukan pengawasan atas kinerja pihak *agent* melalui laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan oleh pihak manajemen. Setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan setiap pihak harus mempunyai komitmen untuk menghargai dan menghormati hak dan wewenang pihak lain, serta tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hak dan kewajiban pihak lain.

2.1.2. Teori Atribusi

Teori tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Heider pada tahun 1958. Dalam tradisi fenomenologi, pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana kita melakukan kontak dengan dunia nyata jika pikiran kita hanya memiliki data indrawi (kesan dan pengalaman). Psikologi gestalt mencoba untuk mengenali prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana pikiran membuat penyimpulan tentang dunia dari data indrawi.

Atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu pemahaman kita akan penyebab perilaku dan merupakan mediator penting bagi reaksi kita terhadap dunia sosial. Sementara ahli lain yaitu Sarwono pada tahun 2009 mengatakan atribusi merupakan analisis kausal, yaitu penafsiran terhadap sebab-sebab dari mengapa sebuah fenomena menampilkan gejala-gejala tertentu. atribusi berarti upaya kita untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus, juga penyebab dibalik perilaku kita sendiri.

Dalam Lubis & Suryani (2018), teori atribusi dikembangkan oleh Heider (1958) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh campuran antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Pada perilaku yang dipengaruhi secara internal merupakan perilaku yang terjadi atas kendali pribadi dari individu tersebut, seperti sikap ataupun motif, lain halnya dengan perilaku yang dipengaruhi secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang maksudnya individu tersebut terpaksa berperilaku dikarenakan situasi tertentu.

Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan perilaku-perilaku perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Teori atribusi ini menjelaskan bahwa kondisi dari luar akan memengaruhi perilaku. Artinya, individu akan bertindak bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena kondisi yang tidak terkendali. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak akan bertindak sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan mereka terhadap beban pajak yang dilakukan oleh kondisi-kondisi tertentu yang terkait dengan pelaksanaan pajak (Jumiati, 2022).

2.1.3 Manajemen laba

Menurut Romadhina (2020), mengungkapkan bahwa semakin besar laba, semakin besar pajak terutang. Perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang memerlukan perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak yang efisien. Manajemen laba digunakan perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik secara legal maupun ilegal guna meminimalkan beban pajak. Bagi perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Manfaat manajemen laba perusahaan adalah efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik akan semakin besar serta penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk investasi (Krisnugraha et al, 2021). Sedangkan manfaat manajemen laba bagi agen adalah agen memperoleh bonus dari pemilik karena meningkatnya laba bersih akibat dari penghematan pajak yang dilakukan. Sedangkan kerugian atas tindakan manajemen laba perusahaan adalah kemungkinan perusahaan memperoleh sanksi dari kantor pajak berupa denda, turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan manajemen laba perusahaan yang dilakukan oleh manajemen yang ditujukan untuk *rent extraction*, adanya tindakan manajemen laba ini juga merugikan pemerintah karena tindakan ini akan mengurangi pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pajak.

Menurut Nafiah (2018), Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam menentukan laba dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Manajemen laba merupakan suatu proses yang disengaja, menurut batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu. Manajemen laba terjadi ketika menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sebagai dasar penilaian kinerja perusahaan yang bertujuan menyesatkan pemilik atau pemegang saham (*shareholders*) atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang di laporkan.

“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources”. Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lain (Asmedi, 2021).

Beberapa motivasi manajemen laba yang mendorong manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

1. Motivasi bonus, yaitu manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.
2. Motivasi kontraktual lainnya, yaitu manajer suatu perusahaan yang memiliki rasio debt/equity yang besar cenderung akan memilih prosedur-prosedur akuntansi yang dapat memindahkan periode mendatang ke periode berjalan. Manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian hutangnya.
3. Motivasi politik, yaitu manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan politik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan lebih ketat.
4. Motivasi pajak, menyatakan bahwa perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan mengurangi labanya yang dilaporkan. Tujuannya adalah dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.
5. Pergantian CEO, yaitu motivasi manajemen laba ada di sekitar waktu pergantian CEO. Biasanya CEO yang akan pensiun atau masa kontraknya menjelang berakhir akan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna meningkatkan jumlah bonus yang akan mereka terima. Hal yang sama akan dilakukan oleh manajer dengan kinerja yang buruk. Tujuannya adalah menghindari diri dari pemecatan sehingga mereka cenderung untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan.
6. Motivasi pasar modal, motivasi ini muncul karena informasi akuntansi digunakan secara luas oleh investor dan para analisis keuangan untuk menilai saham. Dengan demikian, kondisi ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi laba dengan cara mempengaruhi performa harga saham jangka pendek. Ada tiga faktor yang bisa dikaitkan dengan munculnya praktek manajemen laba yaitu:

1. Manajemen akrual (*accruals management*) faktor ini biasanya berkaitan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer (*managers discretion*).
2. Penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib faktor ini berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut.
3. Perubahan aktiva secara sukarela faktor ini biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau mengubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada (*generally accepted accounting principles*).

2.1.4 Kebijakan Dividen

Ridwan (2021) Kebijakan dividen merupakan keputusan manajemen yang diambil oleh rapat umum pemegang saham untuk menentukan apakah dividen akan dibagikan atau disimpan sebagai modal perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan yang rutin membayarkan dividen dapat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki manajemen keuangan yang baik. Hal ini dilakukan untuk memberikan sinyal kepada pasar modal tentang prospek masa depan perusahaan. Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi dapat mempengaruhi pembagian dividen kepada pihak-pihak terkait sehingga keuntungan yang dihasilkan perusahaan serta pembagian dividen yang tinggi sangat diharapkan oleh investor. Investor lebih memilih dividen karena tidak ada jaminan bahwa manajemen tidak akan curang. Hal ini memuat kebijakan dividen menjadi gesekan antara keduanya. Terkadang manajer melakukan rekayasa laba melalui manajemen laba. Manajemen laba terkadang dilakukan oleh manajer untuk keuntungan pribadi dan lebih diutamakan daripada kepentingan investor.

Kebijakan dividen merupakan salah satu fungsi pengelolaan keuangan yang erat kaitannya dengan struktur modal perusahaan. Kebijakan dividen adalah kebijakan yang menentukan pembagian pendapatan di antara mereka yang menggunakan pendapatan untuk membayar pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan dalam bisnis yang berarti bahwa pendapatan tersebut harus diinvestasikan dalam bisnis. Jika perusahaan memilih untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh kemungkinan akumulasi dana internal akan semakin besar. Kebijakan dividen berkaitan dengan pertanyaan tentang penggunaan keuntungan sebagai hak pemegang saham. Pada dasarnya keuntungan dibagi menjadi dividen atau disimpan untuk diinvestasikan kembali (Nurhasanatang, 2020).

Simarmata & Hutajulu (2017) menyatakan bahwa kebijakan dividen terdapat 3 teori yaitu :

1. Teori ketidak relevansi Dividen (*Dividend Irrelevance Theory*)
Teori ini menyatakan kebijakan dividen perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modal. Miller dan Modigliani, 1961 dalam Simarmata & Hutajulu (2017) mereka mengatakan suatu nilai perusahaan hanya ditentukan sebagai kemampuan dasar untuk menghasilkan laba dan risiko bisnisnya. Dengan arti lain yaitu nilai perusahaan tergantung hanya pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivasnya, bagaimana pendapatan tersebut dibagi antara dividen dan laba yang ditahan. Keown et. Al, 2000 dalam Simarmata & Hutajulu (2017) mengatakan bahwa teori ketidak relevanan tidak dapat berhubungan dengan kebijakan dividen dan nilai saham. Secara besar investor hanya mementingkan pengembalian total keputusan investasi, tanpa pedulinya pengembalian tersebut berasal dari *capital gain* atau pendapatan dividen.
2. Teori Dividen yang Relevan (*The Bird in the Hand*)

Pemilik saham lebih menyukai pembayaran dividen saat ini dari pada menundanya untuk di realisasikan dalam bentuk “*capital gain*”. Tarif pajak “*capital gain*” lebih rendah dari pada dividen, tetapi para pemilik saham banyak yang lebih menyukai dividen saat ini, karena pembayaran dividen sekarang maka penerimaan uang tersebut sudah pasti, apabila ditunda kemungkinan apa yang diharapkan pemegang saham akan meleset. Teori ini diikuti oleh Myron Gordon dan John Lintner.

3. Teori Preferensi Pajak (*Tax Preference Theory*)

Teori ini menyatakan adanya pajak terhadap dividen dan *capital gain* maka para investor lebih menyukai *capital gain* karena dapat menunda pembayaran pajak dengan alasan :

1. Keuntungan modal dikenakan dengan tarif pajak yang lebih rendah dari pada untuk pembayaran dividen, karena investor yang kaya akan lebih suka perusahaan menahan dan menanamkan kembali laba didalam perusahaannya.
2. Pajak tidak akan dibayarkan sampai saham terjual, karena adanya nilai efek waktu, satu dolar pajak yang dibayarkan di masa yang akan datang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah. Dari pada satu dolar yang dibayarkan hari ini.
3. Jika selembur saham yang dimiliki oleh seseorang sampai dia meninggal, maka sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Dan ahli warisnya terhindar dari pajak keuntungan modal.

2.1.4.1 Manfaat Kepemilikan Saham

Investor yang melakukan pembelian saham, otomatis akan memiliki hak di dalam perusahaan yang menerbitkannya. Banyak sedikitnya jumlah saham yang dibeli akan menentukan persentase kepemilikan dari investor tersebut. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki investor maka semakin besar juga haknya atas perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Secara umum ada dua manfaat yang bisa diperoleh pembeli saham yaitu manfaat ekonomis dan manfaat non-ekonomis (Nabilah, 2019).

1. Manfaat ekonomis meliputi :

- 1) Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai (*cash dividen*), yaitu kepada setiap pemegang saham dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen saham (*stock dividen*), yaitu kepada setiap pemegang saham dividen dalam bentuk saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki investor akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.
- 2) *Capital gain* adalah keuntungan yang diperoleh investor dari hasil jual beli saham, berupa selisih antara nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan nilai beli yang lebih rendah.

2. Manfaat Non-Ekonomis

Manfaat non-ekonomis yang bisa diperoleh pemegang saham adalah kepemilikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menentukan jalannya perusahaan. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki investor, maka semakin besar pula hak suaranya dalam RUPS.

2.1.4.2 Harga Saham

Menurut Nurhasanatang (2020) Harga saham di bursa efek akan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pada saat permintaan saham meningkat, maka harga saham tersebut akan cenderung

meningkat. Sebaliknya, pada saat banyak orang menjual saham tersebut cenderung akan mengalami penurunan. *Market Price* merupakan harga pasar riil dan merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika pasar sudah tutup, maka pasar adalah harga penutupannya (*closing price*). Harga sebuah saham dapat berubah naik turun dalam hitungan yang begitu cepat. Harga tersebut dapat berubah dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena banyaknya pesanan yang dimasukkan ke system JATS (*Jakarta Automated Trading system*).

Pada perdagangan Bursa Efek Indonesia terdapat 400 terminal komputer di mana para *floor tracker* dapat memasukkan pesanan yang diterimanya dari nasabah. Pada monitor-monitor yang memantau perdagangan saham, terdapat beberapa istilah harga saham, yaitu :

- 1) *Previous Price* menunjukkan harga pada penutupan hari sebelumnya.
- 2) *Open* atau *Opening Price* menunjukkan harga pertama kali pada saat pembukaan sesi I perdagangan, yaitu jam 09.30 pagi.
- 3) *High* atau *Higest Price* menunjukkan harga tertinggi atas suatu saham yang terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut.
- 4) *Low* atau *Lowest Price* menunjukkan harga terendah atas suatu saham yang terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut.
- 5) *Last Price* menunjukkan harga terakhir yang terjadi atas suatu saham.
- 6) *Change* menunjukkan selisih antara harga pembukuan dengan harga yang terjadi.
- 7) *Close* atau *Closing Price* menunjukkan harga penutupan suatu saham pada saat akhir sesi II, yaitu jam 16.00 sore.

2.1.4.3 Laba Per Lembar Saham

Menurut Fakhruddin (2016) EPS (*Earning Per Share*) atau laba per lembar saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar saham yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. *Earning Per Share* memberikan informasi kepada para pihak luar seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk tiap lembar saham yang beredar dipasaran. Laba per lembar saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar.

Faktor yang mempengaruhi *Earning per Share* diperoleh dengan membagi laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan terhadap seluruh jumlah saham yang beredar. Hal ini menunjukkan profitabilitas sangat mempengaruhi *earning per share* perusahaan. Semakin besar profitabilitas yang dihasilkan perusahaan maka semakin besar laba perusahaan sehingga *earning per share* perusahaan juga meningkat (Fakhruddin, 2016).

2.1.5 Beban Pajak Tangguhan

Istilah pajak tangguhan merupakan istilah akuntansi yang digunakan untuk mencerminkan jumlah utang pajak perusahaan pada posisi laporan keuangan dalam periode waktu tertentu. Beban pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan jumlah laba antara laba akuntansi dengan laba fiskal tersebut dapat mendeteksi adanya rekayasa akrual yang bertujuan untuk meminimalkan pajak. Semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya probabilitas manajemen untuk melakukan manajemen laba begitupun sebaliknya (Nursiam, 2021).

Menurut Yuliza (2020) beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba

yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Beban pajak tangguhan diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Beban pajak tangguhan dikelompokkan berdasarkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen.

Jadi kesimpulannya beban pajak tangguhan ialah perbedaan jumlah laba antara laba akuntansi dengan laba fiskal tersebut dapat mendeteksi adanya rekayasa akrual yang bertujuan untuk meminimalkan pajak atau beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

Akuntansi Pajak Tangguhan di Indonesia, akuntansi pajak penghasilan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 paragraf 07 dimana aktiva pajak tangguhan didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat:

1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.
2. Sisa kompensasi kerugian yaitu saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi pada periode yang akan datang.

Dari aspek pengukuran, besarnya nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Paragraf ini mempunyai implikasi bahwa pernyataan ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan melakukan pengukuran subyektif dan beban atas kememadaiannya suatu aktiva pajak tangguhan dan prediksi laba fiskal yang akan datang.

2.1.6 Perencanaan Pajak

Perpajakan adalah iuran rakyat kepada perbendaharaan negara sesuai dengan undang-undang (*enforceable*) dengan tidak menerima jasa timbal balik yang dapat langsung ditampilkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (berlawanan dengan prestasi). Kemudian definisi tersebut disempurnakan. Perpajakan adalah *transfer* kekayaan dari rakyat ke kas untuk membayar pengeluaran sehari-hari, dan *surplus* digunakan untuk tabungan masyarakat, yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi publik (Romantis, 2020).

Romantis (2020) Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemerintah sering menyebabkan manajer mengadopsi berbagai metode untuk meminimalkan perpajakan. Manajemen pajak dapat digunakan untuk menghemat pajak secara legal. Namun perlu diingat bahwa legalitas administrasi perpajakan tergantung pada alat yang digunakan. Legitimasi hanya dapat ditentukan setelah adanya putusan pengadilan. Secara umum, manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, tetapi dapat mengurangi pembayaran pajak sebanyak mungkin untuk memperoleh keuntungan dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan penegndalian pajak (*tax control*). Yuniar (2021) perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak untuk tahun-tahun sekarang dan yang akan datang sehingga pajak yang diayarkan dapat diminimalkan seefisien mungkin dan dengan cara lain sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus tarif pemotongan pajak yang menganalisis ukuran

efektivitas pengelolaan pajak dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun berjalan. Ukuran efektivitas administrasi perpajakan yang diahas dalam penelitian ini adalah ukuran efektivitas perencanaan pajak.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecilkan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor non pajak yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (Romantis, 2020).

Menurut Suandy (2016) strategi perpajakan yaitu:

1. Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan
2. Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan.
3. Pemilihan Metode Penilaian Persediaan
4. Pemilihan Sumber Dana Dalam Pengadaan Aset
5. Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
6. Transaksi yang Berkaitan dengan Pemungutan Pajak (*Withholding Tax*).
7. Optimalisasi Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar.
8. Permohonan Penurunan Pembayaran Angsuran Masa (PPH Pasal 25 Bulanan).
9. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan 23.
10. Rekonsiliasi SPT.
11. Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri

2.1.7 Green Intellectual Capital

Intellectual capital telah menarik perhatian luas peneliti, dan pentingnya modal intelektual telah disorot dalam literatur manajemen. Namun, *intellectual capital* memasukkan konsep lingkungan dan *green intellectual capital* hanya diperkenalkan oleh penelitian Chen pada tahun 2008 (Yi et al., 2019). *Green intellectual capital* merupakan aset yang tidak berwujud atau sebagai pengetahuan yang terkait tentang manajemen lingkungan, gagasan organisasi dan sebagai perantara dalam sebuah inovasi produk yang ramah lingkungan. *Green intellectual capital* merupakan aktiva tidak berwujud yang dimiliki perusahaan termasuk pengetahuan, kebijaksanaan, pengalaman, dan inovasi dalam area perlindungan lingkungan (Mohd et al., 2019).

Intellectual capital dapat dikategorikan menjadi 3 komponen yaitu *Capital Employed (CE)*, *Human Capital (HC)*, dan *Structural Capital (SC)*. *Human capital* merupakan sumber pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. *Intellectual capital* berguna sebagai faktor kunci yang bisa meningkatkan sumber daya manusia, kemampuan perusahaan, menciptakan suatu keberhasilan ekonomi, nilai perusahaan yang bagus, dan juga kinerja keuangan yang bagus sehingga dapat mempertahankan posisi kompetitif mereka. *Intellectual capital* tidak mempunyai bentuk fisik, namun sulit untuk dikuantifikasikan tidak seperti aset tak berwujud dalam laporan keuangan. Hal ini membuat informasi *intellectual capital* hanya dapat diungkapkan pada laporan tahunan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari judul penelitian saat ini, antara lain :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Yulianah, et al (2021)	Analisi Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba.	Variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Variabel beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2.	Gabriella & Siagian (2021)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan IDX BUMN 20 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019.	Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
3.	Nursiam & Widyaningrum (2021)	Analisis Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Asimetri Informasi, dan <i>Free Cash Flow</i> terhadap Manajemen Laba.	Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
4.	Rusdyanawati (2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba.	Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
5.	Rioni (2021)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Non Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.	Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
6.	Febriyanti (2020)	Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba dengan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai Pemoderasi.	Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
7.	Rusdyanawati (2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan	Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

No.	Peneliti	Judul	Hasil
		Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	
8.	Sari (2020)	Peran Kepemilikan Manajerial dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN.	Kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
9.	Yuliza (2020)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba.	Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.
10.	Romantis (2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Yang Dimoderasi Oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak).	Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.
11.	Nabilah (2019)	Pengaruh Kebijakan Dividen, Aktivitas Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen Dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba.	Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
12.	Santi (2018)	Pengaruh <i>tax planning</i> , ukuran perusahaan, <i>corporate social responsibility</i> (CSR) terhadap manajemen laba.	<i>Tax planning</i> (perencanaan pajak) tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.
13.	Husnul (2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba Perusahaan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia.	Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.
14.	Ghafara (2021)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
15.	Dewa & Made (2022)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik	Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba

No.	Peneliti	Judul	Hasil
		Manajemen Laba.	
16.	A.A Gede & I.D.G Dharma (2022)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba.	Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
17.	Fatimatu (2022)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.	Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
18.	Reza , et al(2021)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman	Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manjemen Laba. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
19.	Ferry (2021)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Non manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
20.	Tiara (2022)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
21.	Randi (2021)	Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur).	Perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.
22.	Novi (2022)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba.	Pengaruh perencanaan pajak yang signifikan terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi manajemen laba.
23.	Dewi & Desifa(2021)	Pengaruh <i>Tax Planning</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Corporate Social</i>	<i>Tax Planning</i> tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

No.	Peneliti	Judul	Hasil
		<i>Responsibility</i> (CSR) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman.	
24.	Irsan (2021)	Pengaruh <i>Tax Planning</i> , Beban Pajak Tanggungan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada perusahaan industri barang konsumsi.	<i>Tax planning</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Beban pajak tanggungan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
25.	Dina & Kartika (2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage dan <i>Tax Planning</i> Terhadap Manajemen Laba.	<i>Tax planning</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
26.	Emerensia (2022)	Pengaruh Ukuran perusahaan, Kebijakan Dividen, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
27.	Lucy (2019)	Pengaruh Aset Pajak Tanggungan, Beban Pajak Tanggungan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur.	Beban Pajak Tanggungan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
28.	Chandra & Agustine (2019)	Pengaruh <i>Green Intellectual Capital Index</i> dan Pengungkapan Keberlanjutan Terhadap Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi	<i>Green Intellectual Capital Index</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
29.	Riska , et al (2020)	Pengaruh Beban Pajak Tanggungan, Perencanaan Pajak dan <i>Profitabilitas</i> terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
30.	Rani (2019)	Pengaruh Beban Pajak Tanggungan terhadap Manajemen Laba dengan Umur Perusahaan Sebagai Pemoderasi	Beban pajak tanggungan berpengaruh terhadap manajemen laba.

No.	Peneliti	Judul	Hasil
		(Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	
31	Shaffira (2023)	Peran Moderasi <i>Environmental Management Accounting</i> pada <i>Green Innovation</i> dan <i>Green Intellectual Capital Terhadap Financial Performance</i>	<i>Green Intellectual Capital</i> memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
32	Ramadhani (2022)	Pengaruh <i>Green Intellectual Capital</i> dan CSR terhadap kinerja perusahaan	<i>Green Intellectual Capital</i> berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Sumber : Data Olah (2023)

2.3 Perbedaan Dengan Penelitian Saat ini

(Sari, 2020), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kebijakan dividen terhadap manajemen laba dengan dimoderasi kepemilikan manajerial. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan 39 unit analisis. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan *moderated regression analysis* dengan *software* IBM SPSS Statistics 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Profitabilitas, ukuran perusahaan dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan manajemen laba. Penelitian ini menemukan kepemilikan manajerial dalam perusahaan BUMN mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba.

(Yulianah et al, 2021), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Tax Planning*, *Deferred Tax Expenses*, *Deferred Tax Aset* dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba (Studi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *go public* di sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Hasil dari Variabel penelitian ini menggunakan uji simultan (uji f) dan uji parsial (uji t) adalah secara simultan perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan secara parsial perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

(Gabriella, 2021), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial baik perencanaan pajak maupun beban pajak tangguhan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap manajemen laba. Ini menunjukkan bahwa pada perusahaan BUMN yang terdaftar di indeks IDX BUMN 20 pada tahun 2016-2019, semakin banyak strategi perencanaan pajak yang dilakukan dan beban pajak tangguhan yang ada, maka akan semakin kecil kegiatan manajemen laba yang dilakukan, begitupun sebaliknya. Namun hal ini tidaklah signifikan berdasarkan studi empiris yang telah dilakukan. Jika dilihat dari uji F maka, perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan IDX BUMN 20 pada tahun 2016-2019. Terdapat hasil yang berbeda untuk jenis industri ataupun indeks yang diteliti.

(Emerensia, 2022), kesimpulannya adalah Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kebijakan dividen menunjukkan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham. Semakin tinggi DPR bahwa semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba. Penelitian ini didesain untuk melihat pengaruh ukuran perusahaan, kebijakan dividen, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

(Chandra & Agustine, 2019), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji modal intelektual hijau dan keberlanjutan pengungkapan dalam mempengaruhi kinerja perusahaan keuangan dan non keuangan dengan transparansi sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 188 hingga 213 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dipilih menggunakan metode purposive sampling pada periode 2015 hingga 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa *green intellectual capital index* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

(Shaffira, 2023), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh *environmental management accounting* (EMA) memoderasi hubungan *green Innovation* yang terdiri dari 2 komponen yaitu *green product innovation*, *Green Process Innovation*, dan *Green Intellectual Capital* terhadap Kinerja Keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur peserta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan menghasilkan 154 perusahaan sampel. Hasil dari variabel penelitian tersebut adalah *green process innovation* dan *green intellectual capital* mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan *green product innovation* dan EMA dengan *green process innovation* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

(Ramadhani, 2022) Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis *green intellectual capital* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *green human capital*, *green structural capital*, *green relational capital* dan *corporate social responsibility*. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan sampel 100 responden karyawan dari 20 perusahaan industri Pangan dan Pupuk di BUMN periode 2017-2021. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Metode analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *green human capital*, *green structural capital*, *green relational capital* dan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penerapan *green intellectual capital* dan *corporate social responsibility* membawa implikasi pada praktek perusahaan baik bagi para investor, manajemen perusahaan maupun perusahaan itu sendiri. Memahami dan menerapkan *green intellectual capital* dan *corporate social responsibility* dapat membantu upaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja beserta citra perusahaannya dan diakui oleh masyarakat sekitarnya.

Peneliti ingin memperluas penelitian dengan adanya perbedaan pada variabel independen. Hubungan dari variabel independen dengan dependen yang peneliti gunakan ialah kebijakan dividen, beban pajak tangguhan, dan *tax planning* terhadap manajemen laba yang mana berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti juga menambahkan variabel moderasi yaitu *Green Intellectual Capital*. Tidak hanya variabel independen dan variabel moderasi saja, peneliti juga menggunakan sektor yang berbeda dan populasi yang diambil juga dari seluruh sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2018 - 2022. Peneliti ingin mencari tahu apakah sektor kesehatan ini dapat berpengaruh juga atau sebaliknya dibandingkan dengan penelitian -

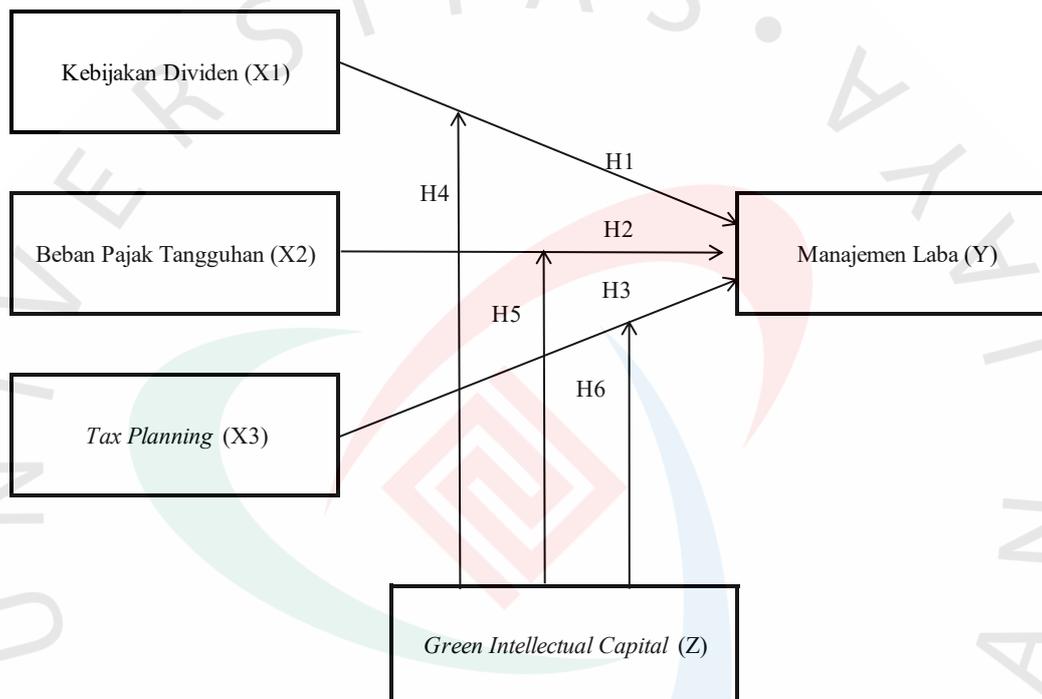
penelitian sebelumnya.

2.4 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2019) Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi, dan telaah kepustakaan.” Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran adalah menjelaskan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olah (2023)

Berdasarkan kerangka berpikir diatas menunjukkan bahwa adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba (Y). Variabel independen terdiri kebijakan dividen (X_1), beban pajak tangguhan (X_2) dan *tax planning* (X_3). Variabel Moderasi yaitu *Green Intellectual Capital*.

2.5 Hipotesa

2.5.1 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Manajemen Laba

Wijayanti & Subardjo (2018), melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap manajemen laba. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian lain yang dilakukan oleh Jeradu (2021), menyimpulkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sementara itu hasil yang sama juga didapat dari

penelitian yang dilakukan oleh Kamalita (2022), menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen berpengaruh terhadap manajemen laba. Amiliyana & Rahayu (2024) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dan Rahmawati & Irawati (2022) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial kebijakan dividen berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba.

Nabilah (2019) Dividen didefinisikan sebagai keuntungan yang akan dibagikan perusahaan kepada pemegang saham setiap tahunnya artinya, jika manajemen memanipulasi data dalam laporan keuangan, dividen dapat menjadi sumber konflik antara manajemen dan pemegang saham. Kebijakan dividen merupakan kebijakan pembiayaan yang sangat mahal, karena perusahaan perlu menyiapkan dana yang besar untuk membayar dividen. Karena sudah diketahui perusahaan akan meningkatkan laba, sehingga kemajuan perusahaan bisa lebih tinggi atau lebih dari sebelumnya. Di sisi lain, manajer terkadang memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan investor atau pemegang saham, karena manajer melakukan manajemen laba untuk kepentingannya sendiri.

Agency theory atau teori keagenan memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kebijakan dividen suatu perusahaan. Teori keagenan membahas hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam suatu organisasi, dengan fokus pada cara mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul antara keduanya. Dalam konteks kebijakan dividen, konflik keagenan dapat timbul karena perbedaan preferensi antara pemilik yang menginginkan dividen yang tinggi untuk memperoleh pengembalian investasi, dan manajer yang mungkin memiliki kepentingan untuk menyimpan keuntungan dalam perusahaan atau mengalokasikannya ke proyek-proyek yang dapat meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang. Teori keagenan menunjukkan bahwa manajer sebagai agen dapat memiliki insentif untuk mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan keinginan pemilik. Dalam konteks kebijakan dividen, hal ini dapat berarti manajer cenderung menahan pembayaran dividen dan mengalokasikan keuntungan perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, seperti ekspansi proyek atau kompensasi eksekutif yang lebih tinggi. Sebagai upaya untuk mengatasi konflik keagenan terkait kebijakan dividen, perusahaan dapat merancang sistem insentif yang memotivasi manajer untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan kepentingan pemilik. Misalnya, pemberian opsi saham kepada manajer dengan ketentuan bahwa harga pelaksanaannya akan meningkat jika dividen tidak dibayar dapat mendorong manajer untuk memprioritaskan pembayaran dividen kepada pemilik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa teori keagenan memberikan pemahaman yang penting tentang dinamika di balik kebijakan dividen perusahaan. Perusahaan perlu mencari keseimbangan yang tepat antara memenuhi harapan pemilik untuk dividen dan memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efisien. Dengan merancang mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan konflik keagenan dan menciptakan kebijakan dividen yang mendukung tujuan jangka panjang perusahaan.

H₁ : Kebijakan dividen berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.5.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Baraja, et al (2019), melakukan penelitian tentang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Hasil nilai t hitung menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Manajemen Laba. Penelitian lain yang dilakukan oleh Faqih & Sulistyowati (2021), menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sementara itu hasil yang sama juga didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018), menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Putra, et al (2019) juga melakukan penelitian

yang menunjukkan bahwa secara parsial beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dan Septianingrum, et al (2022) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial beban pajak tangguhan berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba.

Istilah pajak tangguhan merupakan istilah akuntansi yang digunakan untuk mencerminkan jumlah utang pajak perusahaan pada posisi laporan keuangan dalam periode waktu tertentu. Beban pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan jumlah laba antara laba akuntansi dengan laba fiskal tersebut dapat mendeteksi adanya rekayasa akrual yang bertujuan untuk meminimalkan pajak. Semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya probabilitas manajemen untuk melakukan manajemen laba begitupun sebaliknya (Nursiam, 2021).

Attribution theory atau teori atribusi dapat memberikan wawasan penting terkait dengan bagaimana individu di dalam suatu perusahaan mengatribusikan penyebab dan tanggung jawab terkait dengan keputusan perpajakan, terutama dalam konteks beban pajak tangguhan. Teori atribusi menyelidiki cara individu memberikan arti pada peristiwa dan bagaimana mereka mengidentifikasi penyebab di balik keputusan tertentu. Dalam hal beban pajak tangguhan, individu di perusahaan mungkin memberikan atribusi terhadap keputusan untuk menanggung beban pembayaran pajak kepada berbagai faktor. Misalnya, jika perusahaan memutuskan untuk menanggung beban pajak untuk mengoptimalkan kas dan meningkatkan likuiditas, individu di dalam perusahaan dapat mengatribusikan keputusan tersebut kepada tuntutan keuangan yang mendesak. Sebaliknya, jika keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak jangka panjang, individu mungkin mengatribusikannya kepada inisiatif yang terencana dengan baik untuk mengurangi beban pajak masa depan. Faktor-faktor tersebut dapat mendasari keputusan terkait beban pajak tangguhan, perusahaan dapat merancang strategi komunikasi dan pelaporan yang efektif. Hal ini dapat membantu menghindari ketidakjelasan dan konflik internal serta memastikan bahwa keputusan terkait pajak dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh berbagai pihak di dalam dan di luar perusahaan. Seiring dengan itu, penerapan teori atribusi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkait dengan kebijakan perpajakan perusahaan.

H₂: Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba

2.5.3 Pengaruh *Tax Planning* terhadap Manajemen Laba

Baraja, et al (2019), melakukan penelitian tentang pengaruh tax planning terhadap manajemen laba. Hasil nilai t hitung menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Manajemen Laba. Penelitian lain yang dilakukan oleh Faqih & Sulistyowati (2021), menyimpulkan bahwa tax planning berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sementara itu hasil yang sama juga didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Suryani (2018), menunjukkan bahwa variabel tax planning berpengaruh terhadap manajemen laba. Putra, et al (2019) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial tax planning berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dan Cahyani & Hendra (2020) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial tax planning berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba.

Motivasi perusahaan melakukan manajemen laba antara lain motivasi pajak. Padahal, motivasi penghematan pajak atau *tax planning* merupakan motivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan akan merencanakan seefisien mungkin, dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial dan memperoleh keuntungan dengan menjual saham perusahaan untuk memperoleh tambahan modal dari investor. Status perusahaan yang terdaftar seringkali lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak terdaftar. Oleh karena

itu, dalam rangka meningkatkan nilai saham perusahaan, manajemen terdorong untuk memberikan informasi terbaik mengenai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, pajak yang dapat dibagi dengan investor atau diinvestasikan oleh perusahaan sebagai faktor pengurang laba akan diminimalkan oleh manajemen untuk mengoptimalkan laba bersih perusahaan (Yuliana, 2018).

Teori atribusi atau *attribution theory* dapat memberikan pemahaman yang berharga terkait dengan bagaimana individu di dalam suatu perusahaan mengartikan dan mengatribusikan penyebab keputusan terkait dengan *tax planning* atau perencanaan pajak. Konteks pemahaman ini mendefinisikan bahwa atribusi dapat merinci faktor-faktor yang dianggap sebagai pendorong di balik kebijakan perpajakan yang diambil oleh perusahaan. Misalnya, jika perusahaan mengadopsi strategi perencanaan pajak yang agresif untuk mengoptimalkan beban pajak, teori atribusi dapat membantu menjelaskan bagaimana individu di dalam perusahaan mengatribusikan keputusan tersebut. Apakah kebijakan ini dilihat sebagai respons terhadap tuntutan pasar, inisiatif inovatif dari tim pajak, atau sebagai upaya manajemen untuk mencapai target keuangan dapat dipahami melalui lensa teori atribusi. Selain itu, teori atribusi dapat menggali persepsi individu terkait dengan keberhasilan atau kegagalan dari strategi perencanaan pajak tersebut. Jika suatu kebijakan berhasil mengurangi beban pajak dan meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan, individu mungkin mengatribusikan kesuksesan tersebut kepada kecerdasan atau kebijaksanaan tim pajak. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk merancang komunikasi internal yang lebih efektif dan untuk memahami cara terbaik dalam mengelola ekspektasi, memotivasi, dan mendukung karyawan terkait dengan kebijakan perpajakan.

H₃ : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

2.5.4 Pengaruh *Green Intellectual Capital* dalam memoderasi antara kebijakan dividen dan Manajemen Laba

Febrianti, et al (2020), melakukan penelitian tentang pengaruh *green intellectual capital* terhadap *return* saham masa depan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa secara parsial *green intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return* saham masa depan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Deviandrianti (2018), menyimpulkan bahwa CSR dan kesadaran lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap *green intellectual capital*. Sementara itu hasil yang sama juga didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Kusumadini (2021), menunjukkan bahwa variabel *green intellectual capital* berpengaruh terhadap *green competitive advantage*. Lintang (2023) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa *green intellectual capital* dapat memperkuat pengaruh MFCA dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Dan Shaffira (2023) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa *Green Intellectual Capital* mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Financial Performance.

Dividen dapat menjadi sumber utama kas untuk perusahaan. Keputusan perusahaan untuk membayar atau tidak membayar dividen dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan tekanan manajemen untuk memenuhi harapan investor. Beberapa perusahaan mungkin memanfaatkan manajemen laba untuk membuat kinerja keuangan terlihat lebih baik, terutama jika mereka berada di bawah tekanan untuk membayar dividen.

GIC sendiri dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. GIC dapat berperan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara dividen dan manajemen laba. Peningkatan GIC mungkin mengurangi kecenderungan perusahaan untuk menggunakan manajemen laba sebagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai saham. Investor yang peduli dengan isu-isu lingkungan mungkin lebih memahami dan mendukung keputusan perusahaan terkait dividen jika melibatkan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Green intellectual capital, yang mencakup aspek-aspek seperti inovasi berkelanjutan, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, telah terbukti memiliki dampak yang

signifikan dalam memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap praktik manajemen laba. Dalam hubungannya dengan teori keagenan (*agency theory*), integrasi *green intellectual capital* dapat diinterpretasikan sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan konflik keagenan dengan memperkenalkan dimensi keberlanjutan dalam pengelolaan kebijakan dividen. *Green intellectual capital* menjadi instrumen yang memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap manajemen laba, menciptakan sebuah paradigma di mana perusahaan menggabungkan kepentingan pemegang saham dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui integrasi *green intellectual capital*, perusahaan dapat mengubah dinamika tradisional antara kebijakan dividen dan manajemen laba menjadi sebuah hubungan yang lebih kompleks dan bertingkat. Dengan memperhatikan dimensi keberlanjutan ini, perusahaan mungkin dapat menghasilkan keuntungan lebih besar dalam mengelola kebijakan dividen mereka, yang tidak hanya menguntungkan pemegang saham tetapi juga mencerminkan komitmen mereka terhadap praktik-praktik berkelanjutan.

H₄: *Green Intellectual Capital* berpengaruh dalam memoderasi antara dividen dan Manajemen Laba

2.5.5 Pengaruh *Green Intellectual Capital* dalam memoderasi antara beban pajak tangguhan dan Manajemen Laba

Ramadhani (2022), melakukan penelitian tentang pengaruh *green intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa secara parsial *green intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Christanty (2022), menyimpulkan bahwa *green intellectual capital* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu hasil yang sama juga didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Nasser (2022), menunjukkan bahwa variabel *green intellectual capital* berpengaruh terhadap *green competitive advantage*. Situmorang (2022) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa *green intellectual capital* dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan Salsabila (2022) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa *Green Intellectual Capital* mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Beban pajak tangguhan muncul karena perbedaan antara nilai buku dan nilai pajak aset atau kewajiban di laporan keuangan. Perusahaan dapat menggunakan beban pajak tangguhan untuk mengelola atau memanipulasi laba bersihnya melalui kebijakan akuntansi atau pengakuan pendapatan. Manajemen laba melibatkan tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan sehingga terlihat lebih baik dari kinerja sebenarnya. Beban pajak dapat menjadi salah satu area di mana manajemen laba dilakukan, terutama dalam menentukan tingkat beban pajak yang harus dibayar.

Green Intellectual Capital (GIC) mengacu pada nilai intelektual perusahaan yang terkait dengan praktik bisnis berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan. GIC dapat mencakup pengetahuan, inovasi, dan praktik yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. GIC dapat memainkan peran dalam memoderasi hubungan antara beban pajak tangguhan dan manajemen laba. Perusahaan yang memiliki fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan mungkin lebih berhati-hati dalam mengelola beban pajak tangguhan untuk memastikan kepatuhan dengan praktik-praktik etis dan berkelanjutan. Peningkatan GIC dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk menggunakan beban pajak tangguhan sebagai alat untuk memanipulasi laba.

Perusahaan dengan GIC yang tinggi mungkin lebih berorientasi pada transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan, termasuk aspek-aspek terkait pajak. Fokus pada keberlanjutan dapat menciptakan tekanan tambahan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap aturan pajak tanpa manipulasi yang berlebihan.

Teori keagenan (*agency theory*) mencakup hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam suatu organisasi. Ketika kita mempertimbangkan hubungan ini dalam konteks *green intellectual capital*

dan beban pajak tangguhan pada suatu perusahaan, kompleksitasnya dapat terlihat dalam cara prinsipal dan agen mengelola keberlanjutan dan tanggung jawab pajak. Dimensi *green intellectual capital*, prinsipal mungkin memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai jangka panjang. Namun, manajer sebagai agen mungkin menghadapi insentif untuk mengejar keuntungan lebih cepat atau fokus pada aspek-aspek yang lebih mendesak. Teori keagenan dapat membantu dalam memahami bagaimana konflik kepentingan ini dapat diatasi melalui perancangan sistem insentif dan pengawasan yang mendorong manajer untuk memprioritaskan *green intellectual capital*. Beban pajak tangguhan juga menjadi faktor penting dalam konteks ini. Integrasi teori keagenan dalam hubungan antara *green intellectual capital* dan beban pajak tangguhan dapat membantu perusahaan merancang struktur insentif yang lebih baik dan mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa keputusan manajerial sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan tuntutan keberlanjutan. Modal intelektual yang dimiliki perusahaan jika digunakan secara maksimal pun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini akan menarik investor ke perusahaan yang memiliki modal intelektual dan profitabilitas yang baik.

H₅: *Green Intellectual Capital* berpengaruh dalam memoderasi antara beban pajak tangguhan dan Manajemen Laba.

2.5.6 Pengaruh *Green Intellectual Capital* dalam memoderasi antara *tax planning* dan Manajemen Laba

Putri (2018), melakukan penelitian tentang pengaruh *green intellectual capital* terhadap keunggulan kompetitif. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa secara parsial *green intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aziza (2023), menyimpulkan bahwa *green intellectual capital* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sementara itu hasil yang sama juga didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2023), menunjukkan bahwa variabel *green intellectual capital* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Suhariyanto (2022) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa *green intellectual capital* dapat berpengaruh terhadap *return on assets*. Dan Amalia (2022) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa *Green Intellectual Capital* mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

● *Tax planning* adalah serangkaian strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya secara sah. Ini melibatkan penggunaan kebijakan dan praktik tertentu untuk mengelola beban pajak dan memaksimalkan penggunaan insentif pajak yang tersedia. Manajemen laba melibatkan tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik dari kinerja sebenarnya. Beban pajak seringkali menjadi salah satu komponen yang dimanipulasi dalam manajemen laba.

GIC mengacu pada nilai intelektual perusahaan yang terkait dengan praktik bisnis berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan. GIC mencakup pengetahuan, inovasi, dan praktik yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. GIC dapat memainkan peran dalam memoderasi hubungan antara *tax planning* dan manajemen laba. Perusahaan dengan fokus tinggi pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan mungkin cenderung melakukan *tax planning* secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai berkelanjutan. Peningkatan GIC dapat mengurangi kemungkinan perusahaan menggunakan *tax planning* dan manajemen laba secara agresif dan tidak etis.

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan kunci dalam memahami dinamika hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam suatu perusahaan, terutama ketika mengintegrasikan aspek *green*

intellectual capital dan *tax planning*. Konteks ini menyatakan bahwa *green intellectual capital* merujuk pada modal intelektual yang terkait dengan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sementara *tax planning* adalah strategi perencanaan pajak yang dapat memengaruhi alokasi sumber daya perusahaan. Teori keagenan menyoroti potensi konflik kepentingan antara prinsipal yang menginginkan pertumbuhan jangka panjang dan manajer yang mungkin memiliki insentif untuk mencapai hasil keuangan lebih cepat. Teori keagenan membantu memahami bagaimana mekanisme insentif dan pengawasan dapat dirancang untuk memastikan bahwa manajer memprioritaskan *green intellectual capital* dan praktik bisnis berkelanjutan. Ketika kita mempertimbangkan hubungan ini dalam konteks *tax planning*, konflik keagenan dapat timbul terkait dengan strategi perencanaan pajak yang dapat mempengaruhi alokasi laba dan beban pajak perusahaan.

H₆: *Green Intellectual Capital* berpengaruh dalam memoderasi antara *tax planning* dan Manajemen Laba.